

PENGUJIAN WAGNER'S LAW VERSUS KEYNESIAN HYPOTHESIS: PENDEKATAN REGIONAL INDONESIA

Esti Pasaribu¹⁾, Septriani²⁾

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Indonesia

¹estipasaribu@unib.ac.id, ²septriani@unib.ac.id

ABSTRACT

In this paper, we tested the Wagner's Law against the Keynesian Hypothesis for Indonesia using granger causality test. After conducting theoretical and empirical theory, this paper is analysing the relationship between government expenditure and GDP percapita. The long run parameters and causality test found valid Wagners' Law in Indonesia not Keynesian Hypothesis. The results reveal a positive and statistically significant long run effect running from economic growth toward the government expenditure refer to Wagner's Law in Indonesia. Further more, the growth of population is giving a positive effect for government expenditure also.

Keywords : *Economic Growth¹, Government Expenditure², Granger Causality³*

PENDAHULUAN

Teori dan empiris hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kontroversi yang tidak habis diperdebatkan dalam lingkup perekonomian suatu negara. Perdebatan ini dimulai pada akhir periode 1800an dengan banyaknya bukti empiris yang mengeksplorasi hubungan kausalitas kedua variabel makroekonomi dan menemukan hasil yang berbeda. Adolph Wagner menjadi orang pertama yang mengobservasi hal ini secara serius sehingga kemudian mengundang minat banyak peneliti untuk melakukan pembuktian *Wagners's Law*, yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi belanja pemerintah secara positif. Akan tetapi, sebuah teori yang juga sama pentingnya dalam literatur ekonomi justru menyebutkan bahwa belanja pemerintah dapat menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi melalui multiplier efeknya dalam permintaan agregat.

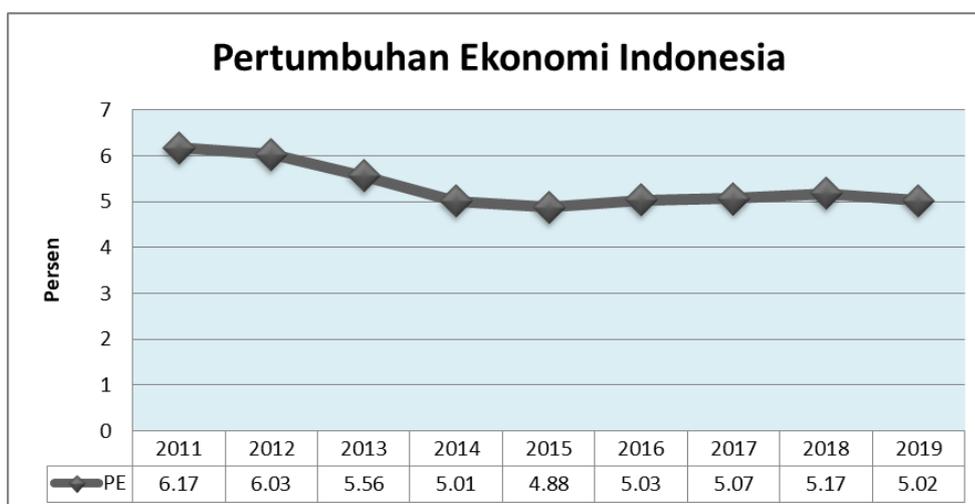
Penelitian ini menarik karena bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Artikel ini akan melihat bagaimana hubungan kausalitas antara kondisi perekonomian dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Kedalaman data dengan menggunakan data kabupaten/kota alih-alih menggunakan data nasional menjadi kebaharuan untuk melihat hubungan yang terjadi secara lebih detail. Lebih lanjut

penelitian membandingkan apakah terjadi perubahan dengan diberlakukannya otonomi daerah pada masing-masing kabupaten/kota.

Otonomi daerah (otoda) menjadi hak dan kewajiban masing-masing daerah dalam hal mengatur urusan pemerintah termasuk keuangannya secara mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Bicara soal otoda di Indonesia, kabupaten dan kota di Indonesia sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi sejak tahun 2004 dengan dasar UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di area finansial tentu sedikit banyak akan mempengaruhi besaran belanja pemerintah.

Penelitian terkait pembuktian *Wagner's Law* versus *Keynesian Hypothesis* di Indonesia belum banyak dilakukan. Sukartini dan Saleh (2012) melakukan pengujian *Wagner's Law* di Indonesia pada periode 1991-2010. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data *time series* dengan prediksi berlakunya *Wagner's Law* di Indonesia. Walaupun demikian, penelitian ini belum secara tegas menyebutkan apakah *Keynesian Hypothesis* tidak terjadi di Indonesia.

Sementara itu, dilihat dari sisi analisa regresi, menurut Peacock dan Scott (2000), kebanyakan penelitian memilih untuk menggunakan data *time series*. Sejauh ini hanya penelitian yang dilakukan oleh Gandhi (1971) yang memilih untuk menggunakan data *cross section*. Sukartini dan Saleh (2012) pun sejauh ini menggunakan data *time series*.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2019

Sumber: BPS, 2020

Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk menguji manakah yang terjadi di Indonesia antara *Wagner's Law* versus *Keynesian Hypothesis* dengan menggunakan data *cross section*. Data yang digunakan adalah data kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2016, dimana pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami kenaikan sebagaimana yang tersaji dalam gambar 1.

Artikel ini disusun sebagaimana berikut. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan dan kebaharuan penelitian. Tinjauan literatur akan mengulas teori yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk penelitian-penelitian sejenis yang terkait dengan permasalahan. Bagian metode membahas data dan sumber data, juga alat analisis yang digunakan. Bagian Pembahasan akan menjabarkan tentang hasil olahan data berikut analisisnya. Terakhir, bagian kesimpulan yang berisi *concluding remark* dan saran bagi penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja pemerintah

Pembangunan ekonomi negara berkembang dipengaruhi oleh peran dari pemerintah. Pengaruh yang diberikan baik dalam hal pembangunan dan kegiatan ekonomi dilakukan melalui pelaksanaan salah satu fungsi dasar pemerintah, yaitu alokasi dan distribusi belanja pemerintah di daerah (Adisasmita, 2011). Dalam upaya peningkatan penyediaan layanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka tentu saja pemerintah membutuhkan sumber penerimaan. Dengan demikian, semakin besar kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka semakin besar pula belanja pemerintah.

Belanja pemerintah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi yang ditetapkan oleh bank sentral, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika dilihat trennya, perkembangan belanja pemerintah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dalam berbagai sistem perekonomian di Indonesia (Suparmoko, 2013). Dalam hal ini tentu saja belanja pemerintah menjadi variabel yang sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam *Wagner's Law*, sesungguhnya perkembangan perekonomian yang memuat hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan lainnya yang membuat perekonomian menjadi lebih kompleks

akan mendorong peran pemerintah yang lebih besar dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Oleh karenanya, belanja pemerintah umumnya akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian. Wagner memprediksi bahwa pengembangan industri ekonomi akan diikuti oleh peningkatan belanja pemerintah (Ighodaro dan Oriakhi, 2010). Dengan demikian, peranan pemerintah dalam perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi yang digambarkan dalam PDB suatu negara.

Peningkatan belanja pemerintah menjadi salah satu total ukur dalam menilai apakah pemerintah berhasil dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Dengan semakin besarnya belanja pemerintah maka kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi penyediaannya oleh sektor swasta dapat dinikmati melalui penyediaannya oleh pemerintah. Namun, kecenderungan peningkatan belanja pemerintah ini tidak serta merta berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang terkadang tidak efektif memicu kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak menimbulkan *multiplier effect* yang positif pada perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya di berbagai wilayah agar pembangunan wilayah bisa berjalan melalui perencanaan anggaran yang tepat guna. Belanja yang tidak direncanakan dan tidak diatur dengan baik menjadi sumber ketidakefisienan dan pemborosan uang negara tanpa menimbulkan efek positif bagi perekonomian (Mahmudi, 2010: 86).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah perubahan kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan kapasitas produksi yang terwujud dalam kenaikan pendapatan nasional negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi bukanlah pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memicu terjadinya pembangunan ekonomi, dimana ini merupakan salah satu *leading indicator* bagi pembangunan ekonomi.

Secara ekonomi, terdapat dua cara perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertama dengan melihat sisi permintaan, yakni menghitung komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Cara kedua dengan melihat dari sisi penawaran,

yakni dengan menjumlahkan semua nilai yambah setiap sektor yang ada dalam produksi suatu negara.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi biasanya dilakukan dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB memuat total pengeluaran dari berbagai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada satu periode tertentu, biasanya selama jangka waktu satu tahun. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, maka data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. PDRB ini menjadi suatu ukuran dalam mengetahui tingkat aktivitas perekonomian suatu daerah tingkat kabupaten/kota.

Wagner's Law versus Keynesian Hypothesis

Adolp Wagner adalah salah seorang yang dikenal dengan teorinya bahwa belanja pemerintah dipengaruhi oleh output. Lebih jauh lagi, Wagner menyampaikan bahwa ada tiga alasan utama mengenai teorinya tersebut. Pertama, pemerintah memiliki kecenderungan untuk memperbaiki sistem administrasi dan mitigasi resiko selama proses pembangunan ekonomi untuk memastikan bahwa pasar berjalan dengan terkendali. Kedua, banyak sektor publik yang permintaannya bersifat elastis, misalnya pendidikan, kegiatan budaya, dan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, tekanan publik untuk mengalokasikan lebih banyak pelayanan publik akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. ketiga, pembangunan ekonomi dengan pelaksanaan proyek proyek skala besar biasanya sulit untuk dibiayai oleh sektor swasta sehingga tetap harus diambil alih oleh pemerintah, khususnya dalam hal penyediaan barang-barang publik (Eldemerdash & Ahmed, 2019).

Dalam berbagai periode, banyak pendekatan yang dibuat untuk menganalisa perkembangan sektor publik. Walt W. Rostow (1960) menyebutkan bahwa peningkatan dalam pengeluaran publik berkemungkinan memiliki kaitan dengan pola pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, sejalan pendapat Alan T. Peacock dan Jack Wiseman (1961) yang menyimpulkan bahwa krisis sosial menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran bagi sektor publik. Wiliam J. Baumol (1967) berargumen bahwa sektor publik yang berada pada kondisi tidak produktif akan mendorong peningkatan pengeluaran sektor privat, yang mana oleh Morris Beck (1976) disebut "*relative price effect*", yang berarti bahwa biaya yang sektor publik akan lebih cepat dibandingkan sektor privat, sehingga

menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran sektor publik. Secara sederhana, *Wagner's Law* dapat diformulakan sebagai berikut:

$$G_t = f(Y_t)$$

Dimana G menunjuk pada besaran sektor publik, Y adalah level pertumbuhan ekonomi, dan t menunjukkan waktu. Adapun bermacam penelitian yang berbeda menggunakan perbedaan dalam menunjuk besaran sektor publik, baik dengan menggunakan data GNP, pertumbuhan belanja pemerintah, ataupun belanja pemerintah perkapita, termasuk juga dalam besaran pertumbuhan ekonomi, bisa menggunakan pengeluaran perkapita, ataupun GNP perkapita.

Bagaimanapun juga, interpretasi yang berbeda dari pengujian *Wagner's Law* dan *Keynesian Hypothesis* dengan banyaknya modifikasi penelitian. Sebagai contoh, Richard A. Musgrave (1969) menggunakan pengeluaran publik total sebagai variabel dependen dengan GNP sebagai variabel independen. Arthur J. Mann (1980) dalam penelitian terhadap negara Mexico, mengestimasi elastisitas pendapatan sektor publik dengan menggunakan GNP perkapita sebagai variabel independen.

Dasar teori yang dikemukakan oleh Wagner terdiri dari tiga komponen yang berbeda. Pertama, teori ini mengamati bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan yang kompleks. Hal ini membutuhkan pengenalan hukum baru dan pengembangan dari struktur hukum. Kedua, ada proses urbanisasi dan peningkatan eksternalitas yang terkait dengannya. Ketiga, Wagner memperdebatkan bahwa barang yang dipasok oleh sektor publik memiliki permintaan elastisitas pendapatan yang tinggi. Klaim ini tampak masuk akal, contohnya untuk pendidikan, rekreasi, dan perawatan kesehatan.

Berdasarkan fakta ini, pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pendapatan akan mengarah pada peningkatan permintaan terhadap produk-produk ini. Bahkan, elastisitas yang tinggi akan menyiratkan bahwa pengeluaran sektor publik akan naik sebagai proporsi pendapatan. Dalam banyak hal, *Wagner's Law* memberikan penjelasan yang baik tentang pertumbuhan sektor publik. Kegagalan utamanya adalah hanya berkonsentrasi pada permintaan layanan sektor publik. (Hindriks & Myles, 2006).

Wagner's Law secara empiris sudah diteliti dalam dan tidak mengejutkan jika hasilnya saling kontradiktif. Sebagai contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Subrahmanyam

Ganti dan Bharat R. Kolluri (1979); Rati Ram (1987) dengan sampel sebanyak 115 negara; Les Oxley (1994) pada negara Britania; Islam di USA; John Loizides dan George Vamvoukas (2005) di UK, Irlandia, dan Yunani; Uysal, D., & Mucuk (2009) pada negara Turki; Narayan & Paresh Kumar pada 9 negara di Asia; Kimakova (2009) dengan sampel sebanyak 87 negara berkembang dan negara maju; Lamartina dan Zaghini (2010) yang melakukan penelitian di 23 negara OECD, Keho (2016) di Afrika, dan Turan & Karakas (2016) di Korea Selatan.

Sebagai tambahan, hasil dari pengujian *Wagner's Law* versus *Keynesian Hypothesis* juga berbeda dan kontradiktif. Penelitian yang dilakukan oleh A. Islam (2001) menemukan bahwa penelitiannya mendukung *Wagner's Law* bukan *Keynesian Hypothesis*. Sementara itu, John Loizides dan George Vamvoukas (2005) menemukan bahwa di UK, Irlandia, dan Yunani hasilnya berbeda-beda, ada yang berhasil membuktikan *Wagner's Law*, namun ada juga yang justru *Keynesian Hypothesis* yang berlaku.

Bagaimanapun juga, teknik ekonometrika yang digunakan dalam analisis empiris juga memiliki dilema. Perbedaan penggunaan data juga menjadi perbedaan dalam penelitian yang sudah dilakukan. Beberapa penelitian yang menggunakan data *cross section* biasanya menganalisa negara yang sedang berkembang. Penelitian dengan data *cross section* ini biasanya dilakukan karena keterbatasan data sehingga analisis *time series* sulit dilakukan. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian *Wagner's Law* versus *Keynesian Hypothesis*, manakah yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan data kota/kabupaten se-Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan data *cross section* tahun 2016, dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik tentang PDRB perkapita dan belanja pemerintah kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu melihat bagaimana hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi maka digunakan alat analisis *granger causality test* dengan program eviews 9.0. Uji ini dapat mengidentifikasi apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah. Hipotesis yang diangkat adalah belanja pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (*Wagner's Law*). Formula yang

digunakan menggunakan versi Mann (1980), dimana hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menggunakan model berikut:

$$G/EG = \alpha + \beta EG + e$$

Setelah ditemukan variabel dependen dan variabel independen, maka dilakukan pengujian regresi berganda dengan memasukkan beberapa variabel kontrol, yaitu pajak dan jumlah penduduk untuk mengetahui besaran pengaruhnya terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$G = \alpha + \beta_1 EG + \beta_2 TAX + \beta_3 POP + e$$

Dimana G adalah belanja pemerintah, EG adalah *economic growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi, TAX adalah penerimaan pajak, dan POP adalah jumlah penduduk. Selanjutnya pada $\alpha = 5\%$ dilakukan uji F dan uji t untuk menguji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger adalah uji hipotesis statistik untuk menentukan apakah suatu rangkaian waktu berguna dalam memperkirakan yang lain, dimana hasil uji mencerminkan bagaimana hubungan antar variabel. Adapun tahapan pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai lag (kelambanan). Jumlah kelambanan dipilih dengan menggunakan kriteria informasi, yaitu kriteria informasi *Akaike Info Criterion* (AIC). Adapun hasil regresi untuk mendapatkan nilai AIC adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Akaike Info Criterion (AIC) untuk Menentukan Lag

Keterangan	Nilai AIC	Hasil
Lag 1	58.65342	-
Lag 2	58.56875	-
Lag 3	58.47964	-
Lag 4	58.46550	Nilai Paling Kecil => Dipilih
Lag 5	58.56354	-

Sumber: hasil olahan data penelitian

Berdasarkan nilai AIC, maka terpilih nilai AIC paling kecil yaitu pada lag 4. Dengan demikian selanjutnya dilakukan uji *granger causality* pada lag 4. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji *Granger Causality* pada Lag 4

Hipotesis	Jumlah Data	F-Statistik	Probabilita
Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Belanja Pemerintah	30	1.07926	0.3552
Belanja Pemerintah dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi		7.66040	0.0025

Sumber: hasil olahan data penelitian

Berdasarkan hasil uji kausalitas diketahui bahwa terjadi hubungan satu arah dimana belanja pemerintah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya. Tidak ditemukan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terbukti bahwa belanja pemerintah menjadi menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.

Setelah mengetahui mana variabel dependen dan variabel independen, perlu juga melihat determinan yang mempengaruhi perkembangan belanja pemerintah, termasuk pertumbuhan ekonomi di regional daerah itu sendiri. Penelitian ini memasukkan variabel tambahan yaitu pajak dan jumlah penduduk. Semua varibel diuji dengan menggunakan regresi berganda *least square*. Adapun hasil olahan data menggunakan *least squares* adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Regresi *Least Square*

Konstanta	EG	TAX	POP
6.12E+11	1783.609	-231226	1530101
(0.0000)	(0.0006)	0.3905	0.0000
*	*	**	*
R2 = 0.775921			
F stat = 173.1360			
Prob F stat = 0.000000			

Catatan: * menunjukkan signifikan pada $\alpha=1\%$, ** menunjukkan tidak signifikan

Sumber: hasil olahan data penelitian

Hasil penelitian ini pada akhirnya berhasil membuktikan keberlakuan *Wagners's Law*, yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi belanja pemerintah. dengan demikian, di Indonesia *Wagner's Law* terbukti terjadi dan bukan *Keynesian Hypothesis*. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia akan memicu realisasi belanja pemerintah pada periode tertentu.

Penelitian ini memiliki hasil yang senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Islam (2001), Wijeweera & Garis (2008), Lamartina & Zaghini (2010), Keho (2016), dan Turan & Karakas (2016). Dalam jangka panjang ditemukan hubungan positif antara GDP perkapita dengan belanja pemerintah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, maka semakin besar pula realisasi belanja pemerintah.

Sementara itu, pertumbuhan jumlah juga penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja negara. Penambahan jumlah penduduk di kabupaten/kota sebesar 1 juta jiwa akan menambah belanja pemerintah sebesar 1,53 persen. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Breunig dan Rocaboy (2008) dimana kenaikan jumlah penduduk akan serta merta meningkatkan beban pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, semakin banyak penduduk Indonesia, maka akan semakin tinggi pula belanja di negara tersebut.

Di sisi lain, pajak memiliki pengaruh negatif terhadap belanja pemerintah. Jika pajak naik sebesar 1 persen, maka belanja pemerintah justru akan turun sebesar 0,23 persen. Hal ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adkison & Mikidadu (2014) dan Taha, R & Loganathan, N (2008). Walaupun demikian, secara parsial variabel pajak tidak signifikan mempengaruhi belanja pemerintah dengan besar probabilita yang tinggi, yakni sebesar 0,3905.

KESIMPULAN

Di Indonesia terbukti *Wagner's Law* terjadi pada tingkat regional, dimana belanja pemerintah dipengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pengeluaran belanja pemerintah daerah akan meningkat pula. Lebih jauh lagi, belanja pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan juga jumlah penduduk dan pajak secara simultan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memicu lebih besarnya belanja pemerintah, namun tidak dengan pajak yang justru tidak signifikan secara parsial. Dengan demikian, Indonesia yang masih merupakan negara berkembang, sesuai *Wagner's Law*, akan sangat

terpengaruh dari perkembangan pembangunan ekonomi yang terjadi. Semakin besar dan banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan, maka akan semakin meningkat pula realisasi belanja pemerintah.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini mengalami keterbatasan dalam pengujian dimana data yang didapatkan juga terbatas data *cross section* tahun 2016. Ke depan dapat dilakukan penelitian secara lebih mendalam dengan memperbaharui periode penelitian yang lebih panjang dan mengembangkan model yang ada sehingga didapatkan kedalaman dalam analisa mengenai pembuktian *Wagner's Law* versus *Keynesian Hypothesis* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adkisson, R.V., & Mohammed, M. (2014). Tax Structure and State Economic Growth during the Great Recession. *The Social Science Journal*, 51, 79-89. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.009>.
- Baumol, W.J. (1967). Macroeconomic of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis. *The American Economic Review*, 57: 415-426. <https://www.jstor.org/stable/1812111>.
- Beck, M. (1976). The Expanding Public Sector: Some Contrary Evidence. *National Tax Journal*, 29(1): 15-21.
- Breunig, R & Rocaboy, Y. (2008) Per-capita Public Expenditures and Population Size: A Non-Parametric Analysis Using French Data, *Public Choice*, 136: 429-445. <https://doi.org/10.1007/s11127-008-9304-z>.
- Eldemerdash, H & Ahmed, K.I.S. (2019). Wagner's Law vs Keynesian Hypothesis: New Evidence from Egypt, *International Journal of Arts and Commerce*, 8(3): 1-18. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332403509_Wagner's_law_vs_Keynesian_hypothesis_New_Evidence_from_Egypt.
- Ganti, S & Bharat R.K. (1979). Wagner's Law of Public Expenditures: Some Efficient Results for the United States. *Public Finance*, 34(2): 223-233.
- Hindriks, J & Myles, G.D. (2006). *Intermediate Public Economics*. London: The Mit Press.
- Ighodaro, Clement, A.U., & Oriakhi, D.E. (2010) Expenditure and Economic Growth Follow Wagner's Law in Nigeria? *Annals of The University of petrosani, economics*, 10 (2), 185-198.

- Islam, A. (2001). Wagner's Law Revisited: Cointegration and Exogeneity Tests for the USA. *Applied Economics Letters*, 8 (8), 509-515. <https://doi.org/10.1080/13504850010018743>.
- Keho, Y. (2016). Testing Wagner's Law in the Presence of Structural Changes: New Evidence from Six African Countries (1960-2013). *International Journal of economics and financial issues*, 6 (1), 1-6.
- Kimakova, A. (2009) Government Size and Openness Revisited: The Case of Financial Globalization. *Kyklos*, 62 (3), 394-406.
- Lamartina, S & Zaghini, A. (2011). Increasing Public Expenditures: Wagner's Law In OECD Countries. *German Economic Review*, 12 (2), 149-164. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0475.2010.00517.x>.
- Loizides, J & Vamvoukas, G. (2005). Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from Trivariate Causality Testing. *Journal of Applied Economics*, 8(1): 125-152.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPYKPN.
- Mann, A.J. (1980). Wagner's Law: An Econometric Test for Mexico 1925-1976. *National Tax Journal*, 33(2): 189-201. <https://mp.ra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/46594>.
- Musgrave, R.A. (1969). *Fiscal Systems*. New Heaven: Yale University Press.
- Narayan, P.K. (2005). The Government Revenue and Government Expenditure Nexus: Empirical Evidence From Nine Asian Countries. *Journal of Asian Economics*, 15, 1203-1216. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2004.11.007>.
- Oxley, L. (1994). Cointegration, Causality and Wagner's Law: A Test for Britain 1870-1913. *Scottish Journal of Political Economy*, 41(3): 286-298.
- Peacock A, Scott A. (2000). The Curious Attraction Of Wagner's Law. *Public Choice*, 102 (2), 1-17. <https://doi.org/10.1023/A:1005032817804>.
- Ram, R. (1987). Wagner's Hypothesis in Time-Series and Cross-Section Perspectives: Evidence for 'Real' Data for 115 Countries. *Review of Economics and Statistics*, 69(2): 194-204. <http://links.jstor.org/sici?sici=0034-6535%2819870...O%3B2-H&origin=repec>.
- Rostow, W.W. (1960). *The Stages of Growth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sukartini, N & Saleh, S. (2012) Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 19 (1): 1-24.
- Suparmoko. (2013). *Keuangan Negara: Dalam teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Taha, R & Loganathan, N. (2008) Causality Between Tax Revenue and Government Spending in Malaysia. *The International Journal of Business and Finance Research*, 2 (2), 62-73. ISSN: 19310269.
- Tulumce, S. Y., & Yayla, N. (2017). Components of government expenditures and economic growth relationship in Turkey: Wagner or Keynes? *Social Sciences*, 12(4), 163-184. <http://saeb.feaa.uaic.ro/index.php/saeb/article/view/459>.
- Turan, T & Karakas, M. (2016). The Effect Of Trade Openness And Income On The Size Of A Government. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 47, 164-178. <https://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/download/478/467>

Uysal, D & Mucuk, M. (2009). The Relationship Between Public Spending and Economic Growth in Turkish Economy. *Finans Politik & Ekonomik Yorumlar*, 46(527), 39-48.

Wijeweera, A & Garis, T. (2009). Wagner's Law And Social Welfare: The Case Of The Kingdom Of Saudi Arabia. *Applied Econometrics and International Development*, 9(2), 199-209.